

IMPLEMENTATION OF WASTE MANAGEMENT POLICY IN LAPADDE SUB-DISTRICT, UJUNG DISTRICT, AT THE PAREPARE CITY ENVIRONMENTAL AGENCY (DLH)

Rosdiana; Harman

STIA Al Gazali Barru
rosdiana@algazali.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine: the implementation of waste management policies and policies on waste management in Lapadde Village, Ujung District.

This research uses descriptive qualitative method or interview. The results showed that the implementation of the waste management policy in Lapadde Kelurahan, Ujung Subdistrict, was already carrying out its duties, but the coordination between the implementers of the implementation and other parties was still limited to incidental meetings which had implications for the inconsistency of waste processing in several public places between related agencies. Policies are not yet based on Standard Operating Procedure (SOP). On the other hand, the incentives / salaries given to field officers are not sufficient to fulfill their monthly living needs. This condition causes the attitude of diligent officers to vary.

Keywords: Management, Policy, Waste, Environmental Service

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGOLAHAN SAMPAH DI KELURAHAN LAPADDE KECAMATAN UJUNG PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) KOTA PAREPARE.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: implementasi kebijakan pengolahan sampah dan kebijakan tentang pengolahan sampah di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif (interview). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengolahan sampah di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung yaitu sudah menjalankan tugas namun koordinasi antara pelaksana implementasi dengan pihak lain masih terbatas pada pertemuan rapat-rapat yang sifatnya insidental yang berimplikasi pada ketidakpaduan pengolahan sampah di beberapa tempat umum antara Dinas terkait. Kebijakan belum didasarkan pada Standard Operating Procedure (SOP) Di lain pihak, insentif/gaji yang diberikan kepada para petugas lapangan belum mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan hidup bulanan. Kondisi tersebut mengakibatkan sikap petugas yang rajin menjadi bervariasi.

Kata Kunci: Pengolahan, Kebijakan, Sampah, Dinas Lingkungan Hidup

A. PENDAHULUAN

Bertambahnya penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volum, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengolahannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu kehelir, pengolahan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah, serta peran masyarakat

sehingga pengolahan sampah dapat berjalan secara profesional, efektif dan efisien (Murdiningsih, 2009).

Persampahan adalah isu penting dalam masalah lingkungan perkotaan yang di hadapi sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas pembangunan. Peningkatan jumlah penduduk kota dari tahun ke tahun menyebabkan produksi sampah pun meningkat. Kesadaran masyarakat akan kebersihan ternyata masih kurang. Permasalahan

sampah di kawasan perkotaan di sebabkan beberapa parameter yang saling berkaitan, yaitu pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, pola konsumsi masyarakat, dan perilaku penduduk, aktivitas fungsikota, dan bangunan, serta kompleksitas problem transportasi. Semua parameter yang disebutkan tersebut saling berinteraksi, sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang sangat signifikan. Maka dari itu sampah merupakan salah satu masalah lingkungan yang perlu mendapat perhatian (Sudrajat, 2017).

Manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan/ penggerakan dan pengawasan/ pengendalian. Istilah manajemen berasal dari kata kerja "to manage" yang berarti menangani, memimpin, membimbing, atau mengatur. Sejumlah ahli memberikan batasan bahwa manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Glover dalam Alma (2011), manajemen sebagai suatu kepandaian manusia menganalisa,

merencanakan, memotivasi, menilai dan mengawasi penggunaan secara efektif sumber-sumber dan bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen sebagai ilmu dan seni mengatur pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan tertentu. Terry dalam Istianto (2010), mengatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sampah adalah barang atau benda yang di buang karena tidak terpakai lagi. Sampah adalah masalah umat manusia, hal-hal negatif yang bisa diakibatkan oleh sampah adalah (1) Secara umum sampah bisa mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar, karena untuk jenis sampah tertentu bisa menimbulkan sumber penyakit, (2) Sampah bisa menurunkan keindahan atau nilai estetika kota, dimana penanganan sampah yang buruk, (3) Sampah bisa menyebabkan polusi udara dan bau busuk yang menyengat, (4) Sampah bisa menyebabkan bahaya banjir pada musim penghujan, di mana sampah yang tidak terangkut dapat menjadi penyumbat saluran-saluran air.

Berbagai upaya dilakukan untuk menangani pengolahan sampah. Namun upaya tersebut kerap mengalami kendala, serta sebagian warga yang tidak disiplin dengan membuang sampah seenaknya. Salah satu yang menimbulkan masalah pengolahan persampahan adalah besarnya biaya untuk menangani pengolahan persampahan mulai dari pengumpulan, pengangkutan sampai dengan pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Biaya ini semakin lama semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Dengan bertambahnya penduduk maka produksi sampah juga meningkat, oleh karena itu efektivitas pengolahan sampah harus ditingkatkan. Pengolahan persampahan suatu kota bertujuan untuk melayani sampah yang dihasilkan penduduknya, yang secara tidak langsung turut memelihara kesehatan masyarakat serta menciptakan suatu lingkungan yang bersih. Saat ini pengolahan persampahan menghadapi banyak tekanan terutama akibat semakin besarnya timbunan sampah yang dihasilkan masyarakat baik produsen maupun konsumen.

Masalah kota-kota besar pada umumnya tidak dapat mengangkut seluruh timbunan sampahnya, yakni sekitar 70-80% saja. Sampah yang

tidak terangkut umumnya dibakar, dipendam, atau dibuang ke selokan dan sungai sehingga menyebabkan aliran air tidak lancar yang pada akhirnya akan menyebabkan banjir. Pemerintah daerah memberlakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan sampah sebagai bentuk tanggungjawab pelayanan publik. Oleh karenanya suatu perkotaan memerlukan pengolahan tersendiri dalam pemecahan persoalan yang dihadapi, salah satu persoalan perkotaan yang cukup krusial adalah masalah sampah kota.

Pengolahan sampah di Kota Parepare juga memiliki faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah tingkat pendidikan, penempatan tempat sampah di dalam rumah, keberadaan pemulung, adanya aksi kebersihan, adanya peraturan tentang persampahan dan penegakan hukumnya. Tingkat partisipasi masyarakat Kota Parepare dalam menangani sampah secara mandiri masih dalam kategori sedang sampai rendah, di samping kesadaran dan partisipasi masyarakat, pengembangan teknologi dan model pengolahan sampah merupakan usaha alternatif untuk memelihara lingkungan yang sehat dan bersih serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat

yang masih enggan melakukan pemilihan sampah.

Dari beberapa kelurahan di Kota Parepare, peneliti melakukan survey awal di mana berdasarkan pengamatan peneliti masih melihat beberapa tumpukan sampah di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul: Implementasi kebijakan pengolahan sampah di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare”.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2011) tipe penelitian kualitatif berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, serta data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sugiyono (2016) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifisme, digunakan

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dan peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan (triangulasi), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat alamiah (naturalistic), penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau komputer. Hal yang penting dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana peneliti mampu merumuskan kategori-kategori permasalahan sebagai sebuah konsep untuk membandingkan data. Dengan demikian penelitian kualitatif membuka ruang yang cukup bagi dialog ilmu dalam konteks yang berbeda, terutama apabila dia dipahami secara mendalam dan “tepat”, sehingga penelitian ini dapat mengeksplorasi sikap, perilaku, dan pengalaman responden melalui wawancara mendalam (interview) dan focus group. Pendekatan ini diharapkan mampu menjangkau realita lapangan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi dan Penelitian ini telah dilaksanakan di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare. Di laksanakan selama 3 (tiga) bulan pada Bulan Desember – Pebruari 2022.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tipe penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini telah dilaksanakan di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare. Di laksanakan selama 3 (tiga) bulan pada Bulan Januari – Maret 2020. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara dengan beberapa informan untuk mendapatkan gambaran implementasi kebijakan pengolahan sampah. Berdasarkan hasil wawancara maka hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pengolahan sampah

Keterbatasan kuantitas implementor mengakibatkan pembagian tugas antara jumlah petugas dan volume pekerjaan belum dapat dikatakan proporsional. Sebagaimana wawancara dengan informan Bapak Daud Tobongi, S.Sos sebagai kepala seksi persampahan, yang menyatakan:

“Pembagian personil untuk bidang kebersihan dan persampahan belum dapat dikatakan proporsional dibandingkan antara jumlah pegawai dengan volume pekerjaan...” (3 Januari 2020).

Berdasarkan hasil observasi, dengan pembagian tugas-tugas tersebut masalah pengolahan sampah di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung dapat teratasi, meskipun hasilnya masih belum maksimal. Kondisi tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara dengan informan Bapak Daud Tobongi, S.Sos sebagai kepala seksi persampahan yang menyatakan:

“Untuk wilayah Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung jumlah personil yang dikerahkan sudah memadai...” (3 Januari 2020).

Demikian juga dengan pernyataan informan Bapak Muhammad Rusli Rasyid sebagai kepala seksi kebersihan yang menyatakan:

“Jumlah petugas sudah cukup memadai karena cakupan wilayah operasi tidak terlalu luas dan pekerjaannya juga tidak terlalu rumit...” (5 Januari 2020).

Tanpa SOP yang baku maka dapat mengakibatkan interaksi antar individu-individu dalam suatu struktur organisasi tidak berjalan efektif. Agar dapat berinteraksi dengan efektif masing-masing individu dapat berpartisipasi pada organisasi yang digabungkannya. Dengan berpartisipasi masing-masing individu dapat untuk lebih mengetahui hal-hal yang harus dilakukan.

Adanya organisasi terbentuk karena dipengaruhi aspek-aspek seperti penyatuan visi dan misi serta mempunyai tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi dari sekelompok orang tersebut terhadap lingkungan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Muhammad Rusli Rasyid sebagai kepala seksi kebersihan diperoleh informasi bahwa:

“Sampai dengan saat ini kita belum memiliki SOP yang mengatur mengenai pembagian tugas kepada para petugas lapangan. Terkadang petugas lapangan ditugaskan secara lisan saja dengan pengaturan jadwal yang sewaktu-waktu dapat disesuaikan ...” (5 Januari 2020).

Meskipun demikian, Bidang Kebersihan dan Persampahan tetap berkomitmen untuk mencapai tujuan pengolahan sampah yang baik, program kerja unggulan untuk meningkatkan efektifitas pengolahan sampah di Kelurahan Lapadde di Kecamatan Ujung adalah pembuatan Raperda Persampahan dan pembangunan TPA sebagaimana hasil wawancara dengan informan yaitu Bapak Ir. Syamsuddin Taha selaku Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare yang menyatakan:

“Semua program disusun guna peningkatan efektifitas pelayanan pengolahan sampah di Kota Parepare

pada umumnya. Namun yang jadi prioritas utama dan program kerja unggulan untuk tahun 2020 adalah Raperda Persampahan dan pembangunan Tempat Pembuangan akhir” (18 Januari 2020).

Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), melalui Bidang Kebersihan dan Persampahan sebagai birokrasi pelaksana dalam implementasi kebijakan pengolahan sampah di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung dalam hal ini sangat strategis.

Jadi keberhasilan kebijakan pengolahan sampah di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung sangat dipengaruhi oleh keberhasilan implementasi kebijakan pengolahan sampah di Kecamatan itu sendiri. Sementara pihak yang paling menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah aparatur birokrasi dalam organisasi pelaksana disamping sistem yang melingkupinya.

Selanjutnya penulis menganalisis dengan mengacu kepada pendapat Jones dalam Jumrotul Arafat (2018), bahwa di dalam organisasi dalam implementasi kebijakan memerlukan perintah atasan yang jelas dan tegas, dan perlu memberikan sanksi bagi aparat yang melanggar, main di dalam implementasi kebijakan pengolahan sampah, sebenarnya pemimpin pelaksana implementasi kebijakan

pengolahan sampah seharusnya memberikan perintah yang diperlukan untuk mempertanggungjawabkan kewajiban-kewajiban tersebut dan kemudian dibagikan dalam cara yang tetap, serta dibatasi secara ketat oleh aturan-aturan yang berhubungan dengan sanksi, yang akan dikenakan bagi para pelaksana implementasi kebijakan yang melakukan pelanggaran.

Jones dalam Jumrotul Arafat (2018), selanjutnya mengemukakan bahwa *“the point is that implementation of policy may very depending on the particular stage of agency development”* maka kegiatan implementasi kebijakan pengolahan sampah di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung, memerlukan organisasi yang mampu berkomunikasi dengan semua pihak yang terkait dengan implementasi kebijakan pengolahan sampah di Kelurahan itu.

Tujuan organisasi ini adalah menjalankan program-program yang telah dirancang untuk kepentingan implementasi kebijakan pengolahan sampah di wilayah tersebut.

2. Faktor penghambat implementasi pengolahan sampah

Interpretasi merupakan proses menafsirkan program kebijakan/ rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Organisasi perlu menginterpretasikan

kebijakan/program untuk dapat siap untuk dilaksanakan. Oleh karena itu diperlukan kesamaan pandang dalam bentuk adanya SOP, Juklak/juknis di mana pelaksana mampu memahami isi sasaran, program, kebijakan.

Menurut Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare, pihaknya berusaha untuk memaksimalkan berbagai hal guna meningkatkan mutu pengolahan persampahan di Kota Parepare adalah salah satunya dengan pengalokasian porsi anggaran yang diharapkan cukup untuk mencapai tujuan dari program kerja yang telah disusun. Hasil wawancara dengan informan yaitu Bapak Ir. Syamsuddin Taha selaku Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare mengungkapkan bahwa:

“Sebagai pimpinan, Kami senantiasa memberikan perhatian khusus dalam upaya mendorong terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan Parepare pada umumnya, khususnya di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung sebagai pusat pemerintahan yakni dengan mengalokasikan anggaran yang diharapkan dapat terserap maksimal untuk peningkatan sarana dan prasarana, pembayaran gaji petugas lapangan, maupun dalam hal penyusunan produk hukum daerah ... “ (18 Januari 2020).

Melalui program pengolahan sampah di Kota Parepare, diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pengolahan sampah, dengan melihat apakah program tersebut memberi manfaat bagi lingkungan masyarakat, apakah program tersebut dapat memacu partisipasi masyarakat, serta apakah program yang telah disepakati tersebut dapat direalisasikan sesuai dengan kemampuan dan daya dukung dari sumber daya yang tersedia.

Dari program tersebut, terdapat 2 (dua) program kerja unggulan yang menjadi prioritas utama bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam peningkatan efektifitas pengolahan sampah di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung yakni Program Raperda Persampahan, dan Program Pengembangan TPA melalui dana APBN serta dana Pendamping APBD. Hasil wawancara dengan informan yaitu Bapak Ir. Syamsuddin Taha selaku Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare mengungkapkan:

"Program kerja unggulan adalah pengembangan TPA. Pengembangan TPA merupakan tuntutan yang sangat mendesak karena di Kota Parepare sudah ada Tempat Pembuangan Akhir yang memenuhi kriteria sesuai amanat undang-undang maupun Peraturan Presiden. Yang kedua adalah Raperda Persampahan yang diharapkan nantinya apabila sudah

terbentuk, dapat meningkatkan efektifitas pengolahan sampah sekaligus dapat dijadikan landasan hukum guna meningkatkan potensi pendapatan daerah melalui retribusi sampah ... " (18 Januari 2020).

Guna mendukung terlaksananya program-program yang telah disusun sudah barang tentu harus didukung dengan kemampuan anggaran dana yang digelontorkan untuk masing-masing program kerja tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu Bapak Andi Sinrang, ST., MM sebagai kepala seksi sarana dan prasarana bahwa:

"Kesesuaian anggaran dengan kebutuhan pengolahan sampah untuk tahun 2019 sudah mencukupi. "Untuk tahun 2019 masalah anggaran kita sudah terpenuhi. Kesesuaian anggaran dengan kebutuhan di lapangan sudah mencukupi..." (25 Januari 2020).

Informasi di atas memberikan gambaran bahwa upaya peningkatan pengolahan sampah di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung dilakukan salah satunya dengan memberikan porsi anggaran yang cukup. Hasil wawancara dengan informan yaitu Bapak Andi Sinrang, ST., MM mengungkapkan bahwa:

"Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang berkaitan langsung dengan pengolahan sampah, anggaran yang dialokasikan sudah

mencukupi. Untuk peningkatan sarana dan prasarana, perawatan armada, juga cukup untuk membayar gaji petugas di lapangan sesuai dengan standar minimum upah minimum untuk saat ini masih bisa dipenuhi” (25 Januari 2020).

Meskipun telah didukung dengan anggaran yang memadai namun masih banyak kendala yang harus dihadapi oleh Bidang Kebersihan dan Persampahan dalam mengatasi masalah pengolahan sampah di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung. Hasil observasi menunjukkan bahwa salah satu kendala adalah partisipasi masyarakat.

Kondisi tersebut disebabkan Dinas Lingkungan Hidup sendiri belum memiliki pedoman yang baku dalam pengolahan sampah khususnya di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu Bapak Ir. Syamsuddin Taha selaku Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare dikemukakan bahwa untuk menyusun petunjuk teknis ataupun petunjuk pelaksanaan program diperlukan sebuah regulasi sebagai landasan hukumnya. Regulasi yang dimaksud masih dalam perencanaan.

“Tahun ini diusahakan pembahasan Raperda Persampahan dan Retribusi Sampah dapat disampaikan ke

DPRD. Dan saat ini pemda melalui Dinas terkait sedang melakukan kajian hukumnya. Diharapkan Raperda tersebut dapat disahkan dan dilaksanakan pada tahun mendatang...” (18 Januari 2020).

Kelemahan implementasi kebijakan pengolahan sampah di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung juga tidak terlepas dari belum adanya SOP yang jelas dalam pengolahan sampah itu sendiri. Hal ini juga berkaitan dengan bentuk-bentuk sosialisasi yang dapat disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Hasil wawancara dengan informan yaitu Bapak Ir. Syamsuddin Taha selaku Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare mengungkapkan:

“Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dari baliho-baliho dan himbuan-himbuan kepada masyarakat agar membuang sampah pada tempat yang telah disediakan...” (18 Januari 2020).

Kondisi berbeda ditemukan oleh peneliti. Yang mana baliho-baliho yang dimaksud tidak ditemukan selama rentang waktu penelitian. Demikian juga halnya dengan himbuan-himbuan yang dimaksud. Pada dasarnya tanpa himbuan sekalipun masyarakat pada umumnya telah membuang sampah pada tempat-tempat yang telah disediakan (kecuali daerah yang belum

mendapatkan distribusi tempat-tempat sampah dari Pemda).

Pada aspek interpretasi, efektifitas implementasi kebijakan pengolahan sampah di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung juga berkaitan erat dengan etos kerja dan komitmen serta kepatuhan implementor dalam menjalankan tugas sesuai dengan tugas dan tupoksinya. Petugas lapangan sebagai ujung tombak peningkatan efektifitas implementasi kebijakan pengolahan sampah dituntut untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu Bapak Andi Sinrang, ST., MM sebagai kepala seksi sarana dan prasarana, komitmen dan etos kerja para petugas lapangan bervariasi. Sebagian rajin, yang sebagiannya lagi biasa-biasa saja.

“Komitmen dan etos kerja petugas lapangan bervariasi. Ada yang rajin, ada yang biasa-biasa saja. Padahal mereka sudah diberikan gaji yang sesuai dengan standar minimum kabupaten/kota. Apabila ada petugas yang tidak masuk kerja, selain diberikan teguran, juga dilakukan pemotongan gaji. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi terhadap kinerja para petugas lapangan tersebut...” (25 Januari 2020).

Kondisi tersebut di atas tidak lepas dari kurangnya insentif yang

diberikan pemerintah kepada para petugas lapangan. Meskipun besaran gaji yang diterima para petugas telah memenuhi standar minimum, namun jumlah tersebut belum dapat dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan bulanan para petugas. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan yaitu Bapak Adnan Arsyad sebagai salah satu tenaga kontrak yang menyatakan:

“Gaji/upah bulanan yang kami terima lumayan untuk memenuhi kebutuhan untuk makan sehari-hari. Tapi pengeluaran lain seperti bayar sekolah anak, dan lain-lain mau tidak mau harus cari-cari lagi di lain ... “ (1 Februari 2020).

Disamping menyangkut insentif, faktor pendidikan menjadi salah satu aspek yang turut menentukan kinerja dalam implementasi kebijakan pengolahan sampah. Hal ini terkait dengan pembagian tugas, bagaimana menterjemahkan maksud dan tujuan sebuah kebijakan, serta bagaimana mengaplikasikan sebuah kebijakan dengan menerapkan metode-metode yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Penulis mendapatkan informasi dari informan yang memberikan keterangan bahwa dahulu, sebelum Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan program pengolahan sampah, masyarakat terpaksa membuang

sampah di sungai maupun dengan cara membakar sampah. Kondisi tersebut mengakibatkan lingkungan terlihat kotor. Hasil wawancara dengan informan yaitu Bapak Adnan Arsyad sebagai salah satu tenaga kontrak mengungkapkan:

“Dulu sampah-sampah dikumpul di lahan kosong di belakang rumah. Sekitar 2 atau 3 hari kemudian dibakar. Sekarang sudah ada tong sampah yang ditaruh di depan hampir di setiap rumah jadi tinggal buang saja ke tong-tong sampah itu ... “ (1 Februari 2020).

Demikian juga dengan hasil wawancara dengan informan yaitu Bapak Haswin salah satu masyarakat yang bermukim di areal pinggiran gunung mengungkapkan:

“Dulu sampah langsung dibuang saja dari dapur. Terkadang sampah-sampahnya ada yang hanyut terbawa arus. Terkadang ada yang nyangkut di bawah kolong, tiang rumah, dan sebagainya. Kalau sudah surut (air surut), sampah-sampahnya jadi menumpuk dan tidak enak dipandang mata...” (2 Februari 2020).

Namun pernyataan berbeda dilontarkan salah seorang informan yaitu Bapak Kusman sebagai salah seorang masyarakat mengatakan:

“Karena di sini tidak ada bak sampah, kendaraan dan petugas sampah masih jauh untuk dijangkau. Mau tidak mau,

sampahnya kami kumpul untuk nanti dibakar ... “ (3 Februari 2020).

Peran Pemerintah dalam memberikan pelayanan perlu menempatkan masyarakat sebagai customer dalam posisi yang seimbang dengan pemerintah sebagai provider. Posisi tersebut dapat ditinjau dari prinsip-prinsip akses informasi dan perbaikan. Ditinjau dari akses, belum semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap pelayanan pengolahan sampah.

A. Pembahasan

Pencapaian tujuan kebijakan tidak mungkin dapat terwujud apabila dilakukan hanya oleh pemerintah saja. Artinya, pemerintah daerah perlu meningkatkan sumber daya untuk memperkuat institusi lokal. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari standar dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan *sosiokultur* yang ada pada tahap pelaksanaan kebijakan. Ketika standar dan sasaran kebijakan terlalu ideal, maka sulit untuk direalisasikan.

Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya perlu menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para

pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam mengoperasionalkan kegiatan yang telah dirancang sebelumnya. Sebaliknya, keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan-tujuan kebijakan. (Wahab, 2008).

Tujuan dan sasaran suatu kebijakan yang dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur, karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan apabila tujuan tersebut tidak dipertimbangkan. Dalam menentukan ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran, dapat dipergunakan pernyataan-pernyataan dari pembuat keputusan sebagaimana direfleksikan dalam banyak dokumen seperti garis-garis pedoman program yang menyatakan kriteria untuk evaluasi terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Namun demikian, Dalam beberapa hal ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran kebijakan harus dideduksikan oleh peneliti, yang

pada akhirnya pilihan ukuran-ukuran pencapaian tergantung pada tujuan-tujuan yang didukung oleh penelitian.

Kebijakan pelayanan pengolahan sampah di Kota Parepare tidak terlepas dari rangkaian konsep dan asumsi yang digunakan sebagai landasannya. Berdasarkan isi peraturan perundangan yang telah diberlakukan, kerangka pemikiran yang digunakan untuk menetapkan kebijakan pelayanan pengolahan sampah, yaitu membah paradigma pengolahan sampah saat ini yang masih “kumpul-angkut-buang” dan sampah yang masih dianggap sebagai limbah atau musuh yang harus dibuang, menjadi “sampah sebagai sumber daya” yang dapat diolah, sehingga menghasilkan pendapatan dan menjadi peluang kesempatan kerja bagi masyarakat serta meningkatkan minat/peran dunia usaha dalam pengolahan sampah.

Berdasarkan pemikiran tersebut, keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan pengolahan sampah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan peraturan kerja yang tepat dan kemampuan para pengelola persampahan dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan merupakan salah satu hal

untuk menilai sejauh mana ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan telah direalisasikan. Seperti diketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Disamping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan sulit diurai oleh proses alam.

Paradigma pengolahan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengolahan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk atau pun untuk bahan baku industri.

pengolahan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. pengolahan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan,

penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pemerintah dalam rangka mencapai tujuan implementasi kebijakan, berupaya melakukan tindakan yang berupa penghimpunan sumber daya dan penyediaan sumber daya. Hasil yang diperoleh dari tindakan yang pertama dapat disebut input kebijakan. Sementara itu, tindakan yang kedua dapat disebut sebagai proses kebijakan. Intinya, bahwa suatu organisasi dalam upaya mencapai tujuan (*goals*), yang *output*-nya dapat berupa jasa pelayanan, kemampuan-kemampuan, maupun program-program, selain memerlukan struktur dan kultur organisasi, perlu juga memiliki sumber daya (*resources*).

Sumber daya tersebut diposisikan sebagai inputs dalam organisasi sebagai suatu sistem, yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis. Secara ekonomis *resources* bertalian dengan biaya (pengorbanan) langsung yang dikeluarkan oleh organisasi dan merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam *outputs*.

1. Aspek Organisasi

Organisasi dalam konteks implementasi kebijakan merupakan

aktivitas membentuk badan-badan, unit-unit, beserta metode-metode yang diperlukan guna mencapai tujuan yang terkandung di dalam kebijakan. Organisasi merupakan kesatuan orang-orang yang melakukan pekerjaan dalam ruang lingkup administrasi. Charles O. Jones dalam Indah Sari (2012) mengemukakan bahwa “the point is that implementation of policy may very depending on the particular stage of agency development.” Setiap kegiatan memerlukan birokrasi yang mampu berkomunikasi dengan pihak yang membuat kebijakan dan juga dengan pihak yang melaksanakan kebijakan.

Tujuan organisasi adalah menjalankan program-program yang telah dirancang. Aktivitas dalam organisasi (*to organized*) adalah “Sebagai kegiatan yang bertalian dengan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode-metode yang mengarah pada upaya merealisasikan kebijakan menjadi hasil (*outcomes*) sesuai tujuan sasaran program (menjadikan program berjalan)

Dalam implementasi kebijakan, pemerintah melakukan tindakan yang berupa penghimpunan & penyediaan sumber daya yang diposisikan dalam sistem organisasi 5 daya (*the Six M*) sebagai input dalam organisasi/

kebijakan yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis. Secara ekonomis *resources*, bertalian dengan biaya (pengorbanan) langsung yang dikeluarkan oleh organisasi dan merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam *output*.

Kedua, sebagai proses kebijakan yakni dalam upaya mencapai tujuan (*goals*), yang *output*-nya: jasa pelayanan, kemampuan-kemampuan, program-program, yang dijalankan dalam struktur dan kultur organisasi. Dalam implementasi kebijakan, organisasi juga mencakup pola-pola wewenang formal dan informal, pembagian kerja diantara berbagai komponen, saluran-saluran komunikasi, ketepatan dalam penentuan fungsi dan wewenang masing-masing unit bagian, pengisian personal, pola hubungan antar unit dan lembaga terkait agar struktur yang ada mampu untuk merespon dan mengadaptasi dengan perkembangan lingkungan yang ada, serta mampu memecahkan masalah.

Implementasi kebijakan memerlukan suatu organisasi pelaksana yang dapat menjalankan dan mengontrol pelaksana kebijakan tersebut. Para pelaksana kebijakan mungkin tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki keinginan dan sumber daya yang cukup untuk melaksanakannya, serta berbagai

hambatan yang mungkin menghalangi implementasi kebijakan.

Beberapa faktor yang dapat menghambat efektifitas implementasi dalam derajat dimensi organisasi misalnya keterbatasan anggaran, keterbatasan personel, metode pelaksanaan (petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis) yang belum baku, hingga koordinasi antar pelaksana implementasi dalam suatu organisasi. Penataan sumber daya dalam implementasi kebijakan pengolahan sampah di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung dititik beratkan pada Bidang Kebersihan dan Persampahan. Segala keperluan dan urusan yang berkaitan dengan pengolahan sampah di Kota Parepare secara umum diselenggarakan melalui Bidang Kebersihan dan Persampahan.

Guna menyikapi masalah tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare memperkerjakan sebanyak 373 orang petugas lapangan yang berstatus tenaga kontrak. Para tenaga kontrak tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. 41 orang supir mobil ;
- b. 26 orang pembersih taman;
- c. 11 orang petugas pemelihara TPA,

- d. 141 orang petugas pembersih jalan;
- e. 106 orang petugas pengangkut sampah;
- f. 27 orang petugas pembersih parit;
- g. 33 orang petugas pekerja taman;
- h. 2 orang penjaga malam;
- i. 2 orang operator alat berat.

Melalui pola perekrutan tenaga kontrak tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap efektifitas pengolahan sampah di Kota Parepare pada umumnya, khususnya wilayah Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung.

Berdasarkan pembahasan dari aspek organisasi, bahwa Organisasi dalam pengolahan sampah di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung menunjukkan bahwa organisasi yang menjadi wadah bagi implementasi pengolahan sampah di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung adalah tempat dimana kegiatan pengolahan sampah dilaksanakan secara bergerak.

Implementasi pengolahan sampah di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung memiliki suatu pola dasar struktur organisasi yang relatif permanen. Akan tetapi dengan adanya perkembangan-perkembangan, kompleksnya tugas-

tugas, kurangnya personil yang berstatus pegawai negeri, serta petugas lapangan yang sifatnya sebagai tenaga kontrak yang sewaktu-waktu dapat diberhentikan secara mendadak, semuanya itu dapat menjadi faktor yang mendorong adanya perubahan-perubahan dalam organisasi implementasi kebijakan pengolahan sampah di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare.

2. Aspek Interpretasi

Interpretasi merupakan proses menafsirkan program kebijakan/rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Organisasi perlu menginterpretasikan kebijakan/program untuk dapat siap untuk dilaksanakan. Oleh karena itu diperlukan kesamaan pandang dalam bentuk adanya SOP, Juklak/juknis di mana pelaksana mampu memahami isi sasaran, program, kebijakan.

Uraian di atas mengarahkan bahwa dimensi interpretasi mengenai pengukurannya dapat dilihat dari indikator: pemahaman terhadap tujuan/program, pemahaman terhadap tupoksi, sosialisasi informasi, sikap petugas, ketepatan media, dukungan masyarakat, dan tindak lanjut perbaikan. Isi dan tujuan implementasi kebijakan pengolahan sampah di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung

sudah dipahami dengan baik. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan informan yang menyatakan para pelaksana sudah paham betul bahwa implementasi kebijakan pengolahan sampah merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat yang bertujuan melakukan perubahan *mindset* bahwa kebijakan pengolahan sampah di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung erat kaitannya dengan aspek lingkungan, kesehatan, dan pariwisata.

Disamping itu peran serta masyarakat dalam meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan pengolahan sampah merupakan suatu tindakan yang integral dan tidak dapat terpisahkan dalam pelayanan pengolahan sampah.

Partisipasi masyarakat di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan pengolahan sampah masih belum maksimal. Masyarakat cenderung menganggap pengolahan sampah hanya merupakan tugas dari Dinas Lingkungan Hidup semata.

Pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa sampah adalah sisa-sisa materi yang tidak dapat digunakan lagi dan harus segera dibuang ke tempat-tempat sampah tanpa harus memilah apakah sampah-sampah

tersebut termasuk dalam jenis sampah organik atau sampah anorganik. Kondisi tersebut disebabkan masyarakat sebagai sumber penghasil sampah tidak pernah diberikan pemahaman oleh instansi terkait (Dinas Lingkungan Hidup) tentang tata cara pengolahan sampah yang baik dan benar.

Sikap masyarakat terhadap implementasi kebijakan pengolahan sampah di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung menurut wawancara dengan informan adalah puas.

Pada umumnya kesadaran masyarakat dalam hal pengolahan sampah di lingkungan masing-masing sudah dapat dikatakan memadai. Hasil observasi menunjukkan bahwa untuk daerah-daerah yang sudah tersedia sarana dan prasarana berupa tong-tong sampah, sebagian besar masyarakat sudah membuang sampahnya secara tertib, terkecuali dengan daerah-daerah yang belum disediakan tong-tong sampah dengan terpaksa harus mengumpulkan sampahnya untuk dibakar.

Berdasarkan pembahasan dari aspek Interpretasi, bahwa aspek interpretasi dalam pengolahan sampah di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare, peran Pemerintah dalam pengolahan sampah masih lebih banyak pada penyedia dan pengelola layanan. Peran pemerintah seharusnya

adalah melayani (melakukan negosiasi dan menjadi perantara beragam kepentingan di masyarakat dan membentuk nilai bersama).

Peran Pemerintah dalam memberikan pelayanan perlu menempatkan masyarakat sebagai *customer* dalam posisi yang seimbang dengan pemerintah sebagai *provider*. Posisi tersebut dapat ditinjau dari prinsip-prinsip akses informasi dan perbaikan. Ditinjau dari akses, belum semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap pelayanan pengolahan sampah.

Sementara itu, masyarakat juga belum banyak mempunyai akses dalam pengambilan keputusan, masukan, saran serta monitoring bagaimana mekanisme pengolahan dilakukan, bagaimana mekanisme penggunaan dana serta sejauh mana potensi pengolahan sampah kepada masyarakat. Dalam hal ini pihak pemerintah perlu mendefinisikan secara jelas mengenai kriteria mendasar melalui suatu keputusan bahwa akses dapat dimiliki oleh semua lapisan masyarakat, termasuk proses distribusi pelayanannya sehingga masyarakat dapat memahami atau menolak keputusan tersebut.

Sosialisasi dan informasi tersebut tidak hanya bermanfaat dalam kaitannya

dengan sumber daya baik dana, tenaga, biaya, ide, dan saran, tetapi juga dalam hal monitoring dan evaluasi setiap kebijakan atau program. Sehingga diperlukan upaya menyebarluaskan informasi jasa pelayanan. Informasi tidak hanya disebarluaskan terhadap pengguna jasa pelayanan (*users*), tetapi juga harus disebarluaskan kepada petugas pelayanan pada tingkat yang paling bawah.

Berbagai informasi tersebut sangat diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana cara pelayanan publik itu dilaksanakan, membuat keputusan terbaik tentang pelayanan apa yang ingin digunakan dan bagaimana cara memperoleh keuntungan maksimum dari pelayanan tersebut.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pengolahan sampah di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare yaitu Dinas Lingkungan Hidup melalui Bidang/Seksi Kebersihan dan Persampahan selaku pelaksana kebijakan sudah menjalankan tugas

namun koordinasi antara pelaksana implementasi dengan pihak lain masih terbatas pada pertemuan rapat-rapat yang sifatnya insidental yang berimplikasi pada ketidakpaduan pengolahan sampah di beberapa tempat umum antara Dinas terkait.

2. Faktor penghambat implementasi pengolahan sampah di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare, belum didasarkan pada *Standard Operating Procedure* (SOP) kegiatan yang bersifat baku pada aspek interpretasi, dukungan masyarakat belum maksimal. Masyarakat masih menganggap pengolahan sampah hanya merupakan tugas dari Dinas Lingkungan Hidup semata. Kurangnya dukungan masyarakat disebabkan kurangnya sosialisasi oleh Dinas Lingkungan Hidup akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah. Di lain pihak, insentif/gaji yang diberikan kepada para petugas lapangan belum mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan hidup bulanan. Kondisi tersebut mengakibatkan sikap para petugas lapangan dalam melaksanakan tugas menjadi bervariasi. Ada petugas yang rajin, yang kurang rajin juga ada.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka diberikan saran dan masukan sebagai berikut:

1. Di harapkan Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Lingkungan Hidup perlu segera merancang dan menetapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berisi petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengolahan sampah serta koordinasi dengan pengelola tempat-tempat umum juga harus ditingkatkan guna meningkatkan efektifitas pengolahan sampah di lokasi keramaian.
2. Diharapkan Dinas Lingkungan Hidup perlu mensosialisasikan program pengolahan sampah yang baik dan benar kepada masyarakat. Pemberian insentif/ gaji kepada petugas lapangan juga perlu menjadi perhatian khusus. Penerapan punish and reward tidak ada salahnya untuk diberlakukan. Bagi petugas yang kinerjanya baik, dapat diberikan kelebihan upah, sedangkan bagi petugas yang kinerjanya kurang baik, dapat dikenakan pemotongan upah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aditya Nugraha. 2018. *Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengolahan Sampah Rumah Tangga melalui Bank Sampah di Jakarta Selatan*. Jurnal Pengolahan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Vol. 8 No. 1 (April 2018): 7-14.
- Istianto, Bambang. 2011. *Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Mitra Wacana Media dengan STIAMI Jakarta.
- Iin Indah Sari. 2012. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pengeleolaan Persampahan/ Kebersihan di TPA Jatiwaringin Oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kabupaten Tangerang*. Skripsi Fakultas Ilmu Sospol Universitas Sultan Ageng Tertyasa Serang.
- Lulu Fakta. 2018. *Implementasi Program 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bank Sampah Purwokerto*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

- Moleong, L.J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- M. Irfan Islamy. 2010. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: BumiAksara.
- Murdiningsih. 2009. *Implementasi Kebijakan Pengolahan Persampahan di Dinas Kebersihan Kota Manado*. Jurnal Administrasi Publik.
- Maulidyka Agustyan Sudrajat, dkk. 2017. *Implementasi Kebijakan Pengolahan Sampah dan Retribusi Pelayanan Kebersihan Di Kota Manado*. Jurnal Ilmiah.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy*. ITS Press. Surabaya.
- Paramitha Adhinul. 2016. *Implementasi Kebijakan Pengolahan Sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung*. Skripsi Universitas Terbuka Jakarta.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Suharsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Tachjan. 2009. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik.
- Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winarno, B. 2014. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS (Center Of Academic Publishing Service).
- Zulhan Khalid. 2018. *Evaluasi Kinerja Pengolahan Persampahan Di Kelurahan Bonto-Bonto Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*. Skripsi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.